

**WAN PRESTASI PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP
PEMBAYARAN KLAIM NASABAH MENINGGAL DUNIA**

(Study kasus Putusan Mahkamah Agung No. 826 K/Pdt/2013)

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



DIAJUKAN OLEH :

ERLANGGA OKTAVIA SOEBROTO

NIM : 02112070

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2016

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Judul.....	i
Lembar Pengesahan Skripsi.....	ii
Halaman Pengesahan Penguji.....	iii
Lembar Siap Diuji.....	iv
Lembar Pengesahan.....	v
Pernyataan Orisinalitas Skripsi.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Abstrak.....	x
Daftar isi.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
Permasalahan 1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2. Penjelasan Judul.....	11
1.3. Alasan Pemilihan Judul.....	11
1.4. Tujuan Penelitian.....	12
1.5. Manfaat Penelitian.....	12
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika.....	19
 BAB II PERTIMBANGAN HAKIM TERHDAP PERKARA NOMOR 826 K/PDT/2013	
2.1. Fungsi Hakim dalam Perkara Perdata.....	21

2.2. Keadilan.....	48
--------------------	----

2.3. Analisis Putusan Mahkamah Agung	51
--	----

BAB III PENYEBAB DITOLAKNYA PERMOHONAN KASASI OLEH HAKIM

AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 826 K/PDT/2016

3.1. Pengertian Kasasi.....	57
-----------------------------	----

3.2. Alasan Permohonan Kasasi.....	61
------------------------------------	----

3.3. Mahkamah Agung Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman.....	64
---	----

3.4. Penolakan Permohonan Kasas.....	68
--------------------------------------	----

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	77
----------------------	----

4.2. Saran.....	77
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAK

Wan prestasi merupakan tindakan tidak terpuji dalam suatu perjanjian, dengan tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak oleh pihak-pihak tertentu seperti yang di sebutkan dalam kontrak. Asas Itikad baik yang teruang dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek*) adalah sebuah landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian yang harus di laksanakan dengan itikad baik..

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa kurang telitian Hakim Mahkamah Agung dalam membuat amar putusan sangatlah merugikan bagi pencari keadilan. Penolakan permohonan kasasi dalam perkara ini sangat dibenarkan karena keberatan kasasi tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi karena banyak mengulang permasalahan pada pembuktian dan fakta-fakta pada pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding.

Kata Kunci : Wan Prestasi, Pertimbangan Hakim, Amar Putusan, Penolakan Kasasi.

ABSTRACT

Wan achievement is the act improperly in the agreement, with swordfish implementation of accomplishment or obligation duly charged by contract by certain parties as mentioned in the contract. The principle of good faith embodied in Setion 1338 Paragraph 3 KUH Perdata is a cornerstone of the legal actions in making an agreement that must by implemented in good faith.

Bassed on the result of this research note that the like of carefully situations Judges Supreme Court in making the verdict is detrimental to the search of justice. Denial appeal in this case is justified because the mind is not subject to cassation appael because many rapeat inpection problems on evidence and fact in the first instance and appeal inspection.

Keywords : Wan Achievement, Consideration of the Judge, Verdict, Denial of Appeal.

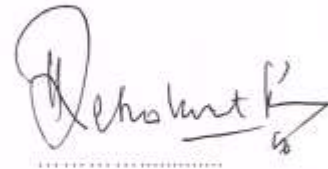
HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tanggal :

5 Agustus 2016

TIM PENGUJI :

TUTIEK RETNOWATI, S.H., M.H.
KETUA



ERMA ZAHRO NOOR, S.H., M.H.
SEKERTARIS



DJAROT PRIBADI, S.H., M.H., M.SI.
ANGGOTA



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum dari hakim dalam perkara Nomor 826 K/Pdt/2013 kurang tepat, amar putusan hakim haruslah memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas kesalahan dan kelalaiannya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2. Penyebab penolakan permohonan kasasi adalah, akibat keberatan kasasi tidak memenuhi kriteria dan keberatan kasasi tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, antara lain keberatan kasasi banyak mengulang fakta-fakta yang telah diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama dan atau tingkat banding.

4.2. Saran

1. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi yang bisa disebut sebagai kiblat dari penegakan hukum yang ada di Indonesia hendaknya lebih cermat dan teliti dalam memutus suatu perkara.
2. Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan penolakan permohonan kasasi sudah berdasar pada peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literature

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Bagir Manan, *Kekeuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 2004*, FH. UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Bismar Siregar, *Segi-Segi Bantuan Hukum di Indonesia*, Psk-Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1986.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke arah Varian Kontemporer*, Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Car I Joechim Friedrich, *Filsafat Hukum Prespektif Hukum Teoristis*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2004.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang dan Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980.
- Han Kalsen, *General Theory of Law and State*, Diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.
- H Van Barneveld, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1980.
- Jhon Ralws, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, English, 1973, yang Telah Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzar Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Juridische Lexicon*, Netherlands-English, Gateway, 1985.
- Kahar Mansyur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1995.
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatife)*, Grafiti Budi Utami, Bandung, 2007.
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Grafiti Budi Utami, Bandung, 1996.
- Man Suparman, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, 1981.
- M Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika Jakarta, 2008.

- Padmo Wahyono, *Prinsip Yuridis Negara Hukum Indonesia*, PSHTN UI, Jakarta, 1998.
- Philipus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2011.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987.
- R Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bale, Jakarta, 1998.
- Retno Wulan Sutiantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 2003.
- Richer A Wassertrom, *The Judicial Decicon*, Standart University Press, 1965.
- Riduan Syahrini, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Riduan Syahrini, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini Jakarta, 2002.
- Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartim, 1991.
- Robert Irwin Mehr and Emerson Cammack, *Prinsiples of Insurance*, New York, AS, RD Irwin, 1961.
- Robert J Janosek, Editor, *Encyclopedia of the American, Judicial System*.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Persada, Jakarta, 1994.
- Sudikno Mertokusumo, *Bahan Kuliah Hukum Selekt Kapita Hukum acara Perdata*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2011.
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Syaifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi*, UIN, Malang, 2004.

V S Cheltena, Sebagaimana Dikutip oleh M Hatta Ali, *dalam Asas-Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dihubungkan dengan Peradilan Restoratif dalam Lingkungan Peradilan Umum di Indonesia*, Disertasi Pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran,, Bandung, 2011.

Wahyu Afandi, Hakim dan Penegakan Hukum, Alumni, Bandung, 1981.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Herzien Inlandsch Reglement.

Rechtreglement Voor de Buitengewesten.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

C. Sumber Lain

Putusan Mahkamah Agung Nomor 826 K/Pdt/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 492/SIP/1970.

Varian Peradilan Tahun 1985.

Hasil Rapat Kerja Nasional, Mahkamah Agung Indonesia Tahun 2010, di Balikpapan di Unduh Tanggal 12 April 2012.

Kamus Hukum, 2015, *Definisi Wanprestasi*, Tersedia di [Http ://www.wordpress.com](http://www.wordpress.com).

Afrianto Budi, 2012, *Definisi Klaim Asuransi*, tersedia di [Http ://www.akademiasuransi.com](http://www.akademiasuransi.com).

Febri Agus, 2014, *Definisi Nasabah Asuransi*, Tersedia di [Http ://www.artidefinisi.com](http://www.artidefinisi.com)

